

2017 tentang
merbitan dan
waban Obligasi
g direvisi atau
li PMK Nomor
ahun 2015

SAR
Kebangan (OJK)
si penghapusan
nerbitan obligasi
Rp3 triliun
sialan rencana
dialokasikan
provinsi dan
kabupaten
berminat ada
Jawa Barat
dan Sulawesi
gusannya
li yang se
nyan lainnya
bukan obligasi
ah Kabupaten

total potensinya
tun barangkali
kemungkinan
n dan yang lain
ul," kata Kepala
Pengawas Pasar
Dhustini Septiana
akun pekan lalu.
li menjadi salah
yang telah mulai
merbitan obligasi
tuk pendanaan

akan dilakukan pada akhir tahun ini.

Adapun dana yang akan dicari mencapai Rp4 triliun dengan tahap awal senilai Rp1,2 triliun. Adapun kebutuhan dana untuk berbagai proyek di kawasan tersebut mencapai kisaran Rp7 triliun.

"Jawa tengah sudah siap target mereka awalnya Rp4 triliun. Tetapi kami mendapat info untuk tahap awal Rp1,2 triliun. Kemungkinan akan bertahap," imbuhnya.

Sementara itu, untuk kawasan lain Djusum mengaku belum mendapatkan informasi lebih rinci. Pasalnya, masing-masing pemerintah daerah masih melakukan kajian dan pengalangan mengenai jumlah dana yang dibutuhkan.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga tengah melakukan kalkulasi terkait dengan kemampuan pemerintah daerah untuk menilai kelayakan suatu daerah menerbitkan obligasi. Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri juga masih melakukan kajian yang sama.

"Kami akan terus sosialisasi ke daerah termasuk ke kabupaten agar minat untuk obligasi daerah ini semakin besar," ujarnya. ■

dipastikan bah
n yang ada telah
a profesional. "Po
ang sangat besar
dak memperkuat
ujarnya.

bagai wujud du
pengembangan
keuangan syariah
telah menyusun
ngembangan eko
euangan syariah
laskan pada tiga
gi utama, yaitu

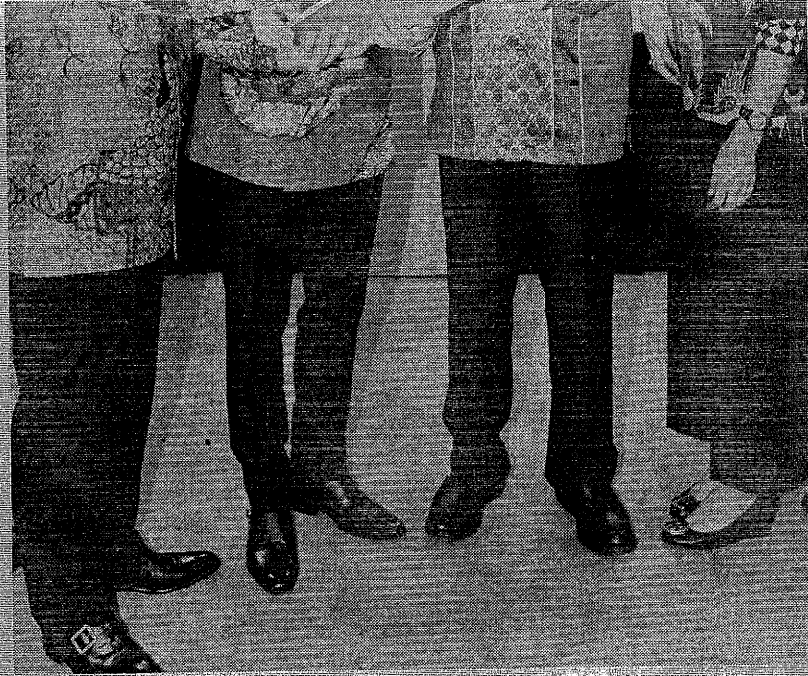
dayaan ekonomi
pendalaman pasar
yariah, dan pilar
en, dan edukasi
keuangan syariah.
erdayaan ekonomi
itikberatkan pada
an sektoral usaha
aluj penguatan se
pok pelaku usaha
mikro, kecil, me
upun besar, serta
nbaga pendidikan
ti pesantren dan
agai bagian dari

ekosistem halal value chain baik pada skala lokal maupun global.

Pilar pendalaman pasar keuangan syariah merefleksikan upaya peningkatan manajemen likuiditas serta pembiayaan syariah, guna mendukung pengembangan usaha syariah. Cakupan pilar ini tidak terbatas pada keuangan komersial, tetapi juga pada sektor zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswa) dan upaya integrasi keduanya.

Pilar penguatan riset, asesmen, dan edukasi termasuk sosialisasi dan komunikasi merupakan landasan bagi tersedianya sumber daya insani yang handal, profesional, dan berdaya saing internasional.

Berbagai bentuk program edukasi dan sosialisasi akan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dan memperoleh manfaat dari pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. (K28)



Bisnis/Abdullah Azzam

Direktur Utama PT Bank Dinar Indonesia Tbk. Hendra Lie (dari kiri) berbincang dengan Pemegang Saham Nio Yantony, Komisaris Utama Syaiful Amir dan Komisaris Independen, Efen Lingga Utama seusai Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) di Jakarta, Kamis (3/5). Pada tahun 2017 penyaluran kredit tumbuh sebesar 3,83% menjadi Rp1.383 miliar dibandingkan dengan 2016 sebesar Rp1.332 miliar dengan pemenuhan porsi kredit UMKM mencapai 25,76% dari total kredit yang disalurkan.



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BISI International Tbk**

Direksi PT BISI International Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 28 Mei 2018
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Gerbera Room, Mezzanine floor,
Hotel Mulia Senayan Jakarta,
Jl. Asia Afrika Senayan, Jakarta 10270

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku 2017.
3. Persetujuan atas penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Mata acara pertama sampai dengan ketiga Rapat merupakan agenda rutin yang diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 dan Peraturan OJK.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 3 Mei 2018, pukul 16.15 WIB.
3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam penghitungan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di alamat-alamat sebagai berikut:
(i). PT Adimitra Jasa Korpora (Biro Administrasi Efek Perseroan)
Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250.
(ii). Kantor Pusat Perseroan
Jl. Raya Surabaya Mojokerto km 19, Sidoarjo.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum, diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK 32, bahan mata acara Rapat berupa salinan dokumen elektronik telah tersedia di situs www.bisi.co.id sejak tanggal pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat berupa salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Sidoarjo, 4 Mei 2018

Direksi PT BISI International Tbk